

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan elemen terkecil dalam sistem pemerintahan yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa memiliki karakteristik masyarakat yang khas dan unik. Setiap desa memiliki beragam potensi, kekayaan alam, keanekaragaman budaya, sosial, dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Keunikan yang dimiliki suatu desa menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berkunjung dan berwisata ke desa tersebut.

Wisata identik dengan sesuatu yang menarik, menyenangkan, unik, dan mampu membuat wisatawan merasa nyaman, aman dan bahagia. Pemandangan alam yang indah, lingkungan yang asri, keragaman budaya yang khas, serta aneka wahana hiburan menjadi daya tarik sebuah destinasi wisata. Daerah tujuan wisata pun beragam, mulai dari ; air terjun, pendakian gunung, pantai, danau, telaga, maupun wisata buatan dengan beragam wahana hiburan di dalamnya. Keberadaan wisata kini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi setiap orang, bahkan keluarga, guna *refresh* kembali otak dan tubuh yang penat bekerja maupun sekedar untuk hiburan bersama teman atau keluarga.

Beragam potensi wisata dan budaya yang dimiliki suatu desa serta tingginya minat wisata bagi setiap orang, mendorong masyarakat desa yang sadar akan wisata untuk mengembangkan desanya menjadi desa wisata. Desa wisata kini mulai banyak dikenal oleh masyarakat Ponorogo. Diantara desa wisata yang ada di Ponorogo diantaranya yakni Desa Wisata Karang Patihan, Kecamatan Balong dan juga Desa Wisata Kupuk, Kecamatan Bungkal. Bahkan saat ini beberapa desa lain di Ponorogo juga mulai menggali potensi desa dan berusaha menjadikan desanya menjadi desa wisata.

Penguatan pengembangan dalam sektor pariwisata menjadi hal yang *urgent*. Ada banyak sektor segi kehidupan yang secara otomatis akan turut terangkat. Jika sektor pariwisata maju dan berkembang, maka dari segi ekonomi perekonomian masyarakat juga akan meningkat, jika dilihat dari segi politik dinamisasi politik juga akan lebih hidup, sosial kemasyarakatan juga akan menguat melalui kelompok-kelompok sosial yang ada, begitu pula budaya yang berkembang di masyarakat akan semakin terlestarikan. Selain itu kondisi sarana, prasarana maupun transportasi juga akan lebih baik demi mendukung pembangunan sektor pariwisata.

Desa Wisata Kupuk berdiri pada tanggal 15 Maret 2016. Desa Wisata Kupuk memiliki beragam potensi alam dan budaya. Desa Kupuk memiliki sendang alam yang unik dan berkelok –kelok seperti ular. Sendang tersebut berada di lahan seluas 5 Ha² dan dikelilinginya terdapat pepohonan berusia ratusan tahun yang rindang sehingga semakin membuat tempat ini indah mempesona. Saat ini juga telah dikembangkan wahana pemancingan bagi pengunjung Sendang Beji dan setiap orang yang menginginkan wahana tersebut dikenakan tiket Rp 10.000,-. Pengelolaan wahana tersebut dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata di Desa Kupuk.

Selain itu di area waduk juga terdapat lahan yang siap untuk ditanami beraneka ragam tanaman produktif, seperti aneka buah-buahan yang dapat dijadikan menjadi kawasan agrowisata. Desa Kupuk juga sudah mengembangkan Taman Patran Indah, yang terletak di area pintu masuk Desa Kupuk dari arah utara sebagai pintu masuk Desa Wisata Kupuk. Saat ini juga telah dibangun gapura untuk pintu masuk area Sendang Beji tersebut.

Desa Kupuk juga memiliki tradisi yang unik setiap tahunnya, yakni acara *Grebeg Selo*. Kegiatan tersebut terilhami dari acara rutin yang digelar tahunan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo yakni *Grebeg Suro*. *Grebeg Selo* yang merupakan kebijakan Lurah Agus Setiyono, S. Pd ini merupakan serangkaian acara bersih desa yang dikemas Pemerintah Desa Kupuk untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik di masyarakat.

Desa Kupuk memiliki 9 Kelompok kesenian yang *ngrembaka* yang akan ditampilkan di setiap Perayaan *Grebeg Selo*. Antusiasme masyarakat dalam acara tersebut sangat meriah bahkan hingga menarik minat pengunjung masyarakat dari luar Desa Kupuk dan luar Kabupaten Ponorogo.

Desa Kupuk merupakan daerah sentra kecil Industri Genteng di Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Selain itu Desa Kupuk juga memiliki potensi industri dan kerajinan, diantaranya terdapat pengrajin ukir jaranan thek, pengrajin anyaman bambu, sentra penyamaan kulit, serta sentra pembuatan wayang kulit. Masyarakat Desa Kupuk juga memiliki beragam mata pencaharian seperti petani, peternak lele, peternak burung puyuh, budidaya jamur, dll.

Berdasarkan hasil praktikum penulis dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Kupuk” memaparkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Kupuk sangat tinggi. Hal ini terbukti dari tingginya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang mendukung terbentuknya Desa Wisata Kupuk. Desa Kupuk memiliki Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang sangat aktif dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata, selain itu POKDARWIS juga memiliki peranan penting dalam menggerakkan masyarakat sekitarnya agar terlibat dan mendukung program pembangunan Desa Wisata Kupuk. Masyarakat begitu antusias dan tanggap dalam mewujudkan Desa Kupuk yang berkembang. Bantuan moril dan materiil masyarakat berikan demi membangun Desa Kupuk.

Selain kaya akan potensi alam, sosial dan budayanya. Desa Kupuk juga memiliki potensi sumber daya manusia yang mendukung program Desa Wisata. Walaupun demikian pembangunan Desa Wisata Kupuk masih belum maksimal sehingga promosi pun juga belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Padahal, Desa Kupuk telah berhasil mendapatkan Juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 dan juga Juara II Lomba Desa Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang lalu.

Salah satu aspek yang penting dalam pengembangan pariwisata adalah strategi yang dilakukan pemerintah desa, karena keberhasilan pembangunan kepariwisataan sangat bergantung pada kemampuan birokrasi di dalam mengelola sumber daya pariwisata. Menurut Kusworo dan Damanik (2002:106) menyatakan bahwa "...penyusunan strategi yang tepat, persoalan manajemen dan perencanaan kepariwisataan merupakan kebutuhan yang mendesak, karena sesungguhnya dari sinilah titik tolak perjalanan industri pariwisata tersebut."

Di era sekarang ini, tuntutan peningkatan kinerja sektor pariwisata sangat tinggi, hal ini berguna untuk memenuhi pencapaian target-target ekonometrik. Pembinaan terhadap sumber daya manusia dan juga birokrasi masih belum begitu kuat disuarakan. Pembangunan dan pembinaan cenderung pada aspek kuantitatif yakni seberapa besar devisa, kesempatan kerja dan kunjungan wisatawan, dan sebagainya. Brohman dalam Kusworo dan Damanik (2002:105-106). Aspek kualitatif cenderung diabaikan seperti perubahan positif mutu sumber daya manusia. Padahal tujuan yang mendasari tujuan pariwisata, seperti target-target ekonomi hanya akan dapat dicapai jika persoalan sumber daya manusia lebih dahulu tertangani. (Kusworo dan Damanik, 2002:106).

Salah satu langkah yang dapat diterapkan pemerintah dalam perbaikan birokrasi dan meningkatkan pembangunan desa/daerah melalui penerapan konsep *good governance* yang melibatkan tiga *stakeholder* yakni *state* (pemerintah atau negara), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Begitupula dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk, keterlibatan beberapa *stakeholder* menjadi kunci utama dalam percepatan pengembangan.

Sehingga dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji terkait dengan **"STRATEGI PEMERINTAH DESA KUPUK, KECAMATAN BUNGKAL, KABUPATEN PONOROGO DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana strategi Pemerintah Desa Kupuk dalam pengembangan Desa Wisata berbasis masyarakat ?
2. Apa saja faktor – faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk berbasis masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Kupuk dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk berbasis masyarakat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk berbasis masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak terkait diantaranya :

1. Pemerintah Desa

Diantara beberapa manfaat penelitian ini bagi pemerintah Desa Kupuk, diantaranya :

- a. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Kupuk dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk berbasis masyarakat. Sehingga dapat memaksimalkan pembangunan Desa Wisata di Desa Kupuk.
- b. Sebagai media pengenalan maupun promosi Desa Wisata Kupuk di kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

2. Masyarakat

Diantara manfaat penelitian ini bagi masyarakat, diantaranya :

- a. Sebagai referensi dalam menentukan lokasi tujuan wisata, salah satunya yakni Desa Wisata Kupuk.

- b. Memberikan peluang baru bagi masyarakat untuk berwirausaha di lokasi wisata tersebut.

3. Kalangan Akademisi

Diantara manfaat penelitian ini bagi kalangan akademisi, diantaranya :

- a. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam perkembangan Desa Wisata di Kabupaten Ponorogo khususnya.
- b. Memberikan peluang untuk penelitian lanjutan, sehingga dapat menemukan ide – ide baru demi kemajuan dan pengembangan Desa Wisata Kupuk.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan mengenai istilah – istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. Penegasan istilah berguna untuk membantu mendefinisikan maksud dari istilah – istilah tersebut. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah :

1. Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti “seni para jenderal” (Steiner & Minner, 1997:18). Sedangkan pengertian strategi menurut Marbun (1996:509) adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut (Kusdi, 2009:87).

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 2 yakni:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Di dalam Pasal 3 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Pengembangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (2012:662), kata pe.ngem.ba.ngan berarti proses, cara, dan perbuatan mengembangkan. Sedangkan pengertian pengembangan masyarakat merupakan proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Soetomo (2006:241) pembangunan atau pengembangan wilayah adalah suatu upaya pembangunan yang berorientasi pada ruang atau wilayah sebagai suatu kesatuan perkembangan fisik, sosial maupun ekonomi.

4. Desa

Pengertian desa sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 yakni:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

5. Wisata

Pengertian wisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan adalah : “Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pembangunan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (2012:1562) Pengertian wisata adalah :

“Bepergian bersama–sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang–senang, dsb); bertamasya; dan piknik. Wisata alam adalah perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya sebagai objek tujuan wisata. Wisata budaya adalah bepergian bersama – sama dengan tujuan mengenali hasil kebudayaan setempat. Sedangkan wisata edukatif adalah wisata untuk memperdalam atau lebih memahami suatu objek agar menambah wawasan, dan pengetahuan baik budaya maupun teknologi.”

Pengertian perjalanan pariwisata berdasarkan Buku yang berjudul Pariwisata Tanah Air Indonesia, ialah :

“...Perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan, hasrat ingin mengetahui sesuatu atau karena alasan kesehatan, olah raga, konvensi, keagamaan, keperluan usaha dan lain-lain.Orang yang melakukan perjalanan pariwisata disebut wisatawan (tourist) apabila tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di daerah/negara yang dikunjungi. Apabila ia tinggal di daerah/negara yang dikunjungi kurang dari 24 jam mereka disebut pelancong (excursionist).” (Dirjen Pariwisata, 1987:13).

6. Masyarakat

Menurut Marbun (1996:339) masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat adalah wahana terjadinya interaksi antar-individu dan hubungan sosial yang terorganisasi dan terpola. (Soetomo, 2009:268)

F. Landasan Teori

Teori berasal dari bahasa Latin *theoria* (atau bahasa Yunani *theoros*) yang berarti *spectator* atau pengamat, yaitu orang yang mengamati, menyaksikan, atau melihat. Sementara kata kerja *theo*, berarti melihat (Kusdi, 2009:2). “...Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan preposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk

menjelaskan dan meramalkan fenomena.” (Sugiyono, 2007:52) Adapun landasan teori dalam penelitian ini diantaranya :

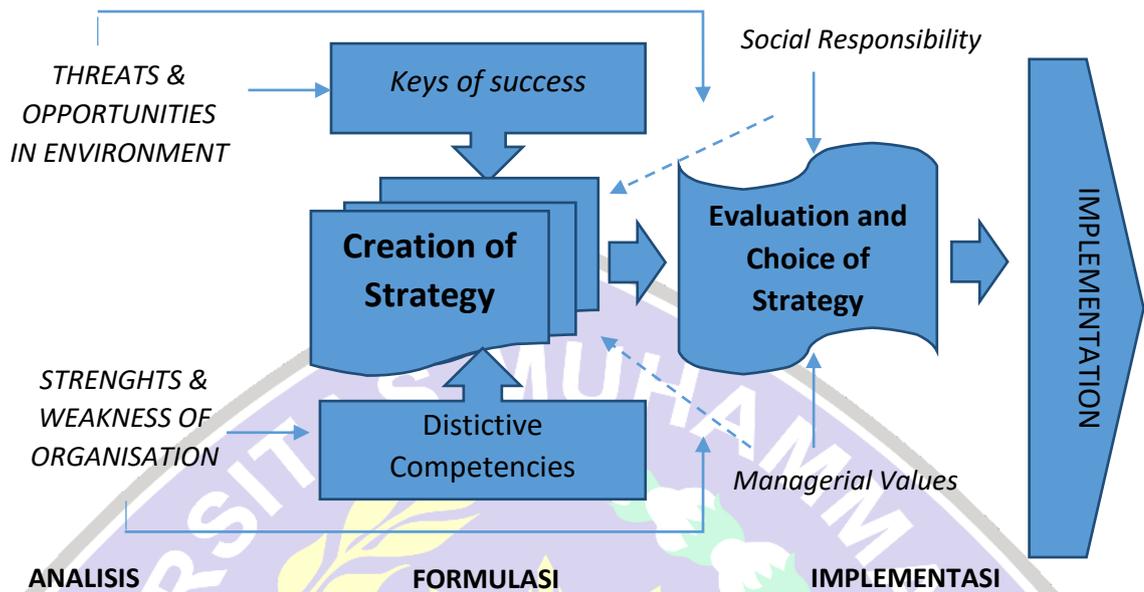
1. Strategi Organisasi

Menurut (Steiner & Minner,1997:18) kata strategi memiliki perhatian utama yang mengacu pada manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah ‘penempatan’ misi organisasi, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Keberhasilan suatu organisasi akan tergantung pada seberapa baik organisasi itu merumuskan kebijakan atau strateginya dalam sorotan cahaya lingkungannya yang berkembang, seberapa baik suatu organisasi tersebut mendefinisikan dan menuangkan kebijakan atau strateginya secara tertulis dan seberapa baik organisasi tersebut menjamin implementasinya (Steiner dan Minner, 1997 :28).

Salah satu model penyusunan strategi adalah model rasional yang merupakan proses yang terdiri dari tiga tahap: (1) analisis; (2) formulasi; (3) implementasi. Pada tahap analisis, terdapat proses analisis eksternal dan analisis internal. Analisis eksternal merupakan tinjauan terhadap lingkungan yang menghasilkan data mengenai ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunities*). Dari analisis ini diperoleh kesimpulan mengenai faktor-faktor yang menentukan kesuksesan organisasi (*key success factors*). Sementara itu, analisis internal merupakan tinjauan terhadap berbagai kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) dalam organisasi itu sendiri. Dari analisis internal diperoleh kesimpulan mengenai kompetensi-kompetensi khusus yang dimiliki organisasi (*distictive competencies*). Kombinasi dari kedua hal inilah sebagai bahan bagi pengambil kebijakan untuk menyusun strategi organisasi. Lazimnya, proses analisis ini disebut analisis SWOT (*strenghts, weakness, opportunities, threats*)(Kusdi, 2013: 88-89).

GAMBAR 1.1
PROSES STRATEGI MENURUT MODEL RASIONAL



Sumber : Kusdi (2013:88).

Tahap formulasi strategi (*creation of strategy*) tidak berlangsung secara pragmatis, melainkan dikontrol oleh tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan nilai-nilai organisasi (*manajerial values*). Tujuannya adalah agar strategi yang dirumuskan memiliki pertanggungjawaban secara sosial maupun secara nilai-nilai. Setelah didapat berbagai pilihan strategi, maka tindakan selanjutnya adalah mengevaluasi pilihan-pilihan tersebut. Berdasarkan data SWOT dan sekali lagi dikontrol dengan *social responsibility* dan *manajerial values*, maka pengambil kebijakan dapat memutuskan strategi terbaik yang harus diambil. Tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi yang telah dipilih tersebut. (Kusdi, 2013: 89)

Sesungguhnya, ruang lingkup strategi sangatlah luas. Begitu juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan organisasi. Setidaknya ada empat dimensi pokok yang terkandung dalam strategi menurut Robbins (dalam Kusdi, 2013:90).

- 1) Inovasi. Strategi inovasi khusus yang dilakukan organisasi dengan mengutamakan inovasi sebagai sumber keunggulan bersaing. Tidak semua perusahaan atau organisasi melakukan strategi inovasi, tetapi pada saat-saat tertentu barangkali strategi ini dirumuskan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- 2) Diferensi Pasar. Strategi diferensi pasar ditujukan untuk menciptakan loyalitas konsumen melalui suatu produk atau jasa yang bersifat unik, dalam arti berbeda dari yang telah ada di pasar. Strategi ini tidak harus dengan menciptakan produk atau jasa yang berkelas tinggi atau mahal, melainkan sesuatu yang memiliki nilai tambah yang berbeda dari produk-produk atau jasa yang ada. Strategi ini biasanya diperkuat dengan iklan, segmentasi pasar, dan permainan bunga (*pricing*).
- 3) Jangkauan (*Breadth*). Strategi jangkauan adalah penetapan ruang lingkup pasar yang akan dilayani oleh organisasi: ragam atau jenis konsumen, cakupan geografisnya, dan jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan.
- 4) Pengendalian biaya (*cost-control*). Strategi pengendalian biaya adalah sejauh mana perusahaan mengontrol biaya atau anggaran secara ketat. Strategi ini penting, khususnya ketika pengelola organisasi harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai secara maksimum tujuan-tujuan organisasi.

“...Strategi dalam organisasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan atau kontinu. Di akhir tahap implementasi selalu diperlukan suatu evaluasi, yaitu berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.” (Kusdi, 2013:90) Sehingga hasil evaluasi yang ada dapat digunakan sebagai bahan perbaikan untuk perumusan strategi berikutnya.

2. Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat

Salah satu andalan perekonomian nasional adalah pengembangan pariwisata yang dalam operasionalnya bertumpu pada potensi alam, potensi budaya, dan kehidupan masyarakat di lokasi pembangunan pariwisata tersebut. (Prasiasa, 2011:94). Melalui pariwisata, kebudayaan masyarakat tradisional agraris sedemikian rupa bertemu dan berpadu dengan kebudayaan masyarakat modern industrial. Kebudayaan-kebudayaan itu saling menyapa, saling bersentuhan, saling beradaptasi dan tidak jarang kemudian menciptakan produk-produk budaya baru (Sunyoto Usman, 1998:53).

Community Development atau Pengembangan Komunitas bisa juga diterjemahkan sebagai pengembangan masyarakat, yakni suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. (Soetomo, 2006:79)

Jika dilihat sebagai suatu proses perubahan dan pembaharuan, dua unsur yang dianggap paling hakiki dan diharapkan saling mendukung dalam *community development* adalah partisipasi masyarakat dalam memperbaiki taraf hidupnya sedapat mungkin berdasarkan prakarsa sendiri dan pelayanan teknis atau bentuk pelayanan lain untuk mendorong prakarsa masyarakat. (Soetomo, 2006:99)

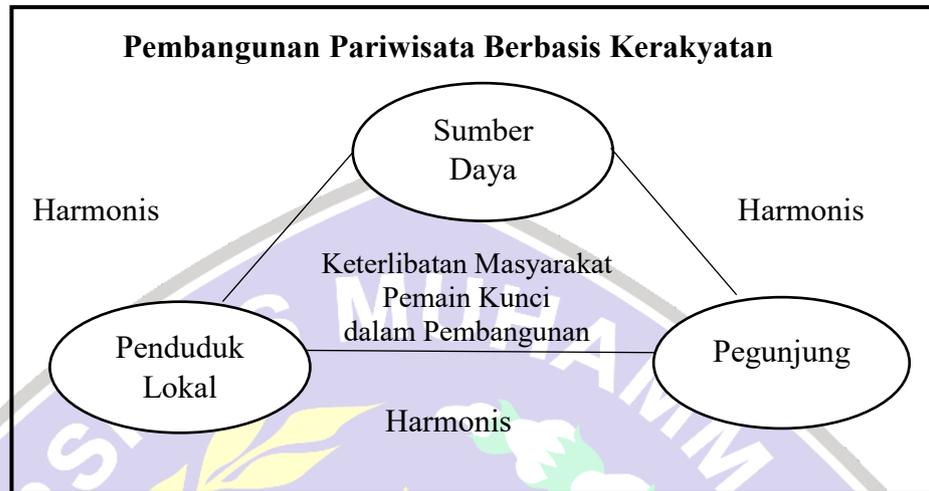
Community Development merupakan salah satu strategi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Sebagai suatu gerakan, *community development* tidak bersifat netral, melainkan berusaha melakukan reformasi terhadap kondisi yang kurang menguntungkan (Soetomo, 2006:96). Andre G Frank (dalam MacPherson yang dikutip Soetomo, 2006:121) menilai bahwa kelemahan pelaksanaan program *community development* di beberapa negara sedang berkembang lebih

banyak disebabkan karena kesalahan asumsi yang digunakan. Diantara asumsi tersebut yakni : (1) anggapan bahwa komunitas yang berskala kecil adalah satuan yang memiliki potensi untuk berkembang secara mandiri; (2) komunitas baik di pedesaan maupun di perkotaan belum terintegrasi ke dalam masyarakat nasional dan ekonomi nasional; (3) bahwa ada satu kepentingan yang seragam dalam suatu komunitas tertentu. Dalam pandangannya. Pemecahan masalah dan usaha perbaikan tidak dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan dalam komunitas lokal tetapi harus dilakukan dalam lingkup regional atau bahkan nasional.

Untuk mengkaji pengembangan pariwisata yang mengutamakan keterlibatan masyarakat, maka dapat menggunakan teori pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan. Pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat merupakan pembangunan yang berfokus pada penggunaan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) ...yakni dengan menekankan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. (Prasiasa, 2011:100)

Berikut ini adalah konsep dan arti penting pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menurut Prasiasa (2011, 99).

GAMBAR 1.2
MODEL PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS
KERAKYATAN



Arti Penting Pembangunan Pariwisata Berbasis Kerakyatan :

- a) Pembangunan diartikan untuk kesejahteraan masyarakat
- b) Revitalisasi masyarakat melalui penggunaan sumber daya
- c) Promosi pariwisata harmonis dengan kehidupan lokal dan lingkungan hidup
- d) Kapasitas merespon untuk meningkatkan permintaan pariwisata.

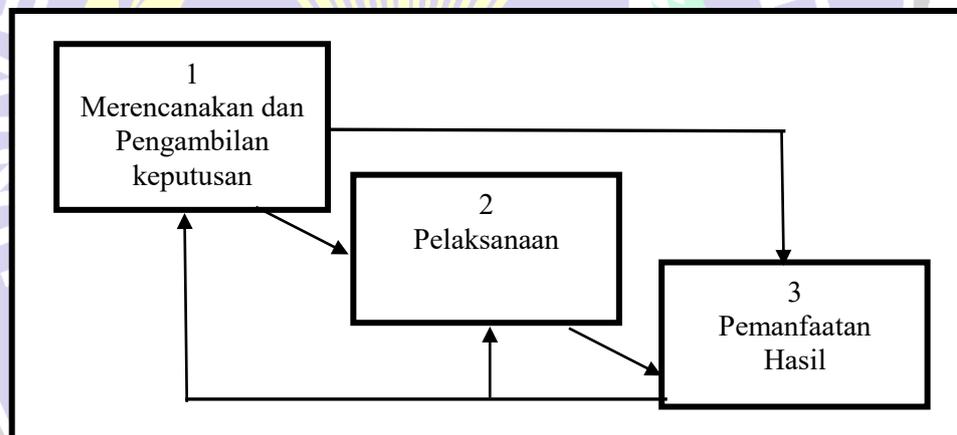
(Sumber : Prasiasa (2011, 99))

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menuntut adanya keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat disebut sebagai partisipasi masyarakat. Partisipasi menurut Dr. Made Pidarta (dalam Dwiningrum, 2011:50) adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Dwiningrum juga menjelaskan keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam

segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Kemudian menurut Uphoff *et al.* (dalam Nasution, 2009:18) ada 3 (tiga) dimensi partisipasi, antara lain : (1) jenis partisipasi apa yang dipertimbangkan; (2) siapa yang berpartisipasi di dalamnya, dan (3) bagaimana partisipasi terjadi. Untuk jenis partisipasi ada 4 (empat) yakni; (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam memanfaatkan hasil, dan (4) partisipasi dalam penilaian. Keempatnya telah mencakup rangkaian berbagai aktivitas pengembangan pedesaan yang terintegrasi secara potensial.

GAMBAR 1.3
TAHAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN



Sumber : Kaho (dalam Nasution, 2009:44)

Sekalipun partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan unsur esensial yang melekat dalam penyelenggaraan itu, tapi tidak berarti setiap orang dapat berpartisipasi dengan intensitas dan kapasitas yang sama dalam penyelenggaraan pembangunan. Sebab itu perlu ditegaskan, dalam partisipasi terkandung pengertian seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya, misalnya keahliannya, kepentingannya (masalahnya), ataupun tingkat kemampuannya. Dengan kata lain orang dapat berpartisipasi secara

parsial, dalam pengertian hanya terlibat dalam salah satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosedial, dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas. (Nasution, 2009:44)

Pembangunan Masyarakat bukanlah suatu tindakan yang dilakukan hari ini dan berakhir keesokan harinya. Sehingga intervensi yang dilakukan tidak boleh menyebabkan ketergantungan, dalam arti masyarakat tergerak untuk melakukan berbagai aktifitas membangun pada saat ada intervensi dan kembali statis setelah intervensi berakhir. Jika demikian, maka kesinambungan proses pembangunan akan terhambat bahkan dapat berhenti. Sebaliknya, apabila intervensi tersebut berhasil mengembangkan kapasitas masyarakat, maka keberlanjutan akan tetap terjaga walaupun intervensi dihentikan. Ini dikarenakan prakarsa dan aktifitas mandiri yang telah terlembagakan. (Soetomo, 2006:25)

Implementasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, seharusnya memberikan kewenangan secara penuh atas pengelolaan pariwisata, sedangkan pemerintah dan pelaku pariwisata hanya sebagai mitra kerja. Bahkan, pada masa mendatang struktur organisasi yang melibatkan pemerintah sebagai pemeran utama dalam pengelolaan desa wisata perlu didekonstruksi. Tujuannya agar masyarakat setempat benar-benar seluruhnya terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Kupuk.

3. Konsep *Good Governance*

Governance adalah mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society*, dan sektor swasta. *Governance* yang baik memiliki unsur-

unsur akuntabilitas, partisipasi, *predictability* dan transparansi (Sumarto, 2009:15).

Dalam konsep *governance* paling dasar, disebutkan bahwa ada 3 *stakeholder* yang menjadi komponen utama dalam pembangunan, diantaranya yakni *state* (pemerintah atau negara), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Mereka berinteraksi dan menjalankan fungsi serta perannya masing-masing, pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, serta masyarakat sebagai pembangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak maupun menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi (Sumarto, 2009:25).

Salah satu unsur *stakeholder* yang perlu disorot yakni sektor swasta. Keberadaan dan keterlibatannya sama penting dengan pemerintah maupun *civil society*, namun mereka kurang menyadari perannya dalam mewujudkan *good governance*, bahkan mereka sering merasa dimusuhi, sehingga lebih banyak menghindar untuk terlibat dalam berbagai urusan yang tidak langsung terkait dengan kepentingan bisnisnya (Sumarto, 2009:26-27).

Zak dan Knack (dalam Sumarto, 2009:126-127) menyebutkan bahwa *trust* digunakan sebagai indikator utama dalam menentukan *governance quality*, khususnya *interpersonal trust*. Di beberapa negara dengan tingkat *trust* tinggi, memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang rendah.

Salah satu perspektif baru dalam penjabaran *good governance* adalah *partnership*, yang hanya dapat dicapai melalui *trust* (kepercayaan) antara beberapa pihak terkait. Tanpa adanya *partnership*, *good governance* akan sulit diraih. *Partnership* diperlukan untuk melipatgandakan dukungan dari sektor publik dan sektor privat dalam upaya membangun komunitas. Pemerintah lokal terlibat karena harus mampu memanfaatkan sumber daya yang terbatas sebaik mungkin (Sumarto,2009:119).

4. Desa Wisata

Desa wisata menurut Nuryanti (dalam Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau, 2016:2) merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Desa wisata menurut Urmila (2013:131) merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya.

Menurut Wearing (dalam Urmila, 2013:132) Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal.

G. Definisi Operasional

Menurut Sekaran dalam Juliansyah Noor (2012:97) definisi Operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep / variable agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep / variable. Dimensi (indikator) dapat berupa : perilaku, aspek, atau sifat / karakteristik.

Sehingga, dengan adanya definisi operasional peneliti dapat mengetahui batasan indikator atau ukuran dari suatu variabel agar mudah

diukur sesuai dengan teori/konsep yang ada. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa indikator, diantaranya :

1. Indikator Strategi Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk adalah :

- a. Pemerintah Desa membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
- b. Pemerintah Desa mengadakan program untuk meningkatkan skill anggota
- c. Pemerintah Desa melakukan inovasi khusus dalam pembangunan desa wisata Kupuk
- d. Pemerintah Desa menjembatani terciptanya home industri, maupun UMKM Desa yang memiliki produk atau jasa yang bersifat unik dan berbeda dari yang ada di pasaran
- e. Pemerintah Desa melakukan strategi promosi yang menarik
- f. Pemerintah Desa melakukan pengendalian biaya atau mengontrol biaya secara ketat.
- g. Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan
- h. Pemerintah Desa melibatkan komponen *private sector* dalam pengembangan Desa Wisata untuk mencapai *good governance*

2. Indikator Pembangunan Desa Wisata dalam penelitian ini adalah:

- a. Memiliki Kelompok Sadar Wisata yang aktif dan produktif
- b. Komunitas lokal (kelompok masyarakat) tumbuh, berdampingan dan bersinergi dalam pembangunan desa wisata
- c. Memaksimalkan potensi alam, potensi budaya dan kehidupan masyarakat di lingkungan Desa Kupuk
- d. Menciptakan daya tarik wisata (alam, budaya, tradisi, atau lainnya) yang khas dan unik
- e. Tersedianya fasilitas umum

- f. Tersedianya fasilitas pariwisata
 - g. Aksesibilitas yang mudah
3. Indikator Pembangunan Desa Wisata Berbasis Masyarakat dalam penelitian ini adalah :
- a. Masyarakat desa antusias, mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan desa wisata
 - b. Keterlibatan masyarakat dalam tahap-tahap pembangunan (perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil) dan juga tahap evaluasi
 - c. Pembangunan desa wisata untuk kesejahteraan masyarakat
 - d. Penggunaan sumber daya oleh masyarakat (revitalisasi masyarakat)
 - e. Promosi pariwisata harmonis dengan kehidupan lokal masyarakat dan lingkungan hidup
 - f. Kemampuan masyarakat dalam merespon situasi dan kondisi yang berkembang untuk meningkatkan promosi wisata

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk mengenai penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi, atau analisis teori mengenai suatu cara/metode, atau cabang logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. (Juliansyah Noor, 2011:22).

Metodelogi penelitian juga dapat diartikan sebagai ilmu mengenai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni : rasional (masuk

akal), empiris (dapat diamati indra manusia), dan sistematis (langkah-langkah tertentu yang logis). (Sugiyono, 2010:3)

Adapun metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna (data yang sebenarnya, serta data yang pasti yang mengandung nilai dibalik data yang tampak). Penelitian bentuk deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif cenderung memusatkan perhatian pada masalah aktual pada saat penelitian berlangsung.

Creswell (dalam Juliansyah Noor, 2011:34) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan menganalisis strategi Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Wisata Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk meneliti desa tersebut dikarenakan keragaman budaya yang dimiliki, tingkat partisipasi dan solidaritas masyarakat yang tinggi, serta prestasi Desa Kupuk yang berhasil menjadi Juara I Lomba Desa se-Kabupaten Ponorogo dan juga Juara II Lomba Desa se-Jawa Timur pada 2016 yang lalu.

3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

tertentu sehingga layak untuk dijadikan informan. Pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu dengan pertimbangan karakteristik populasi. Adapun informan dalam penelitian ini Pemerintah Desa Kupuk sebanyak 2 orang, Kelompok Sadar Wisata sebanyak 2 orang, masyarakat Desa Kupuk sebanyak 2 orang, serta 1 orang wisatawan.

4. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2010:308) Sumber data primer diperoleh langsung peneliti melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. (Sugiyono, 2010:309) Dokumen tersebut dapat meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, media informasi, dan sumber referensi kepastakaan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2011:308)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai kondisi

sesungguhnya di lapangan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan melakukan evaluasi. Sehingga, observasi penting dilakukan guna mengetahui kondisi mengenai pembangunan Desa Wisata Kupuk, kondisi sosial dan budaya masyarakat, tradisi yang ada, keadaan masyarakat sekitar, serta kondisi kelompok/komunitas lokal seperti misalnya (POKDARWIS).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan berhadapan secara langsung (*face to face*) dengan informan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur yang termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dalam pelaksanaannya peneliti lebih bebas bertanya dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam proses wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan cermat serta mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. (Sugiyono, 2010:320)

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data deskriptif mengenai kebijakan dan strategi Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Wisata Kupuk, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan Desa Wisata Kupuk.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencatatan segala peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, audio (rekaman) ,maupun karya-karya monumental seseorang. (Sugiyono, 2006:240) teknik dokumentasi penting dalam penelitian ini guna mendukung data penelitian. Diantara dokumentasi dalam penelitian ini seperti ; surat-menyurat, catatan harian, rekaman hasil wawancara, foto-foto, laporan, dll.

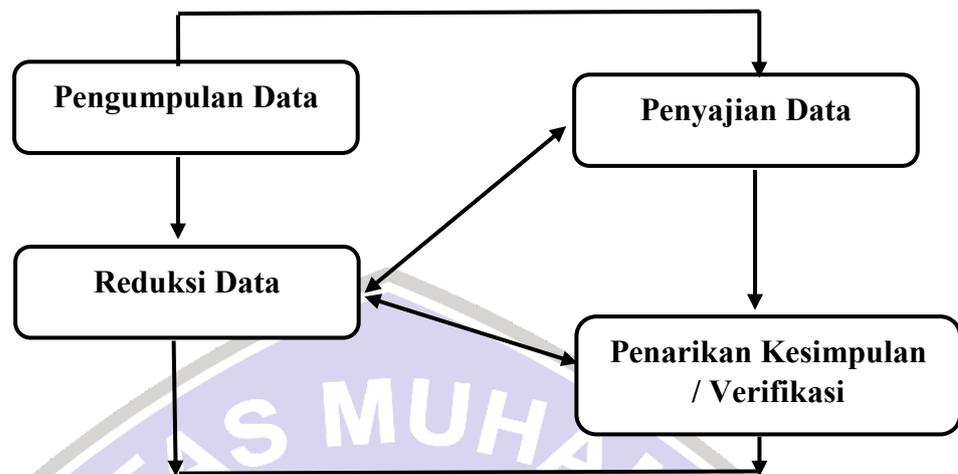
6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, melakukan seleksi data yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2010:335)

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama di lapangan. Hal ini dilakukan bersamaan pada saat berlangsungnya pengumpulan data dan setelah selesainya pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:337) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsungnya secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi). Model interaktif dalam analisis data sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1 berikut ini :

GAMBAR 1.4

ANALISIS DATA MODEL INTERAKTIF



(Sumber : Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:338))

Adapun tahapan –tahapan dalam proses analisis data, menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:338-345) adalah :

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Proses awal dalam penelitian kualitatif adalah pengumpulan data-data yang ada di lapangan, baik hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dilakukan karena data yang terkumpul dari lapangan cukup banyak sehingga perlu dilakukan penyaringan atau seleksi data untuk menemukan hal-hal pokok, rangkuman keseluruhan, dan fokus pada hal-hal terpenting yang perlu. Sehingga data yang terkumpul lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles dan Huberman juga menyatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam

penyajian data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

d. *Conclusion Drawing/ verification* (Pengarikan Kesimpulan / Verifikasi)

Tahap ini adalah tahap akhir analisis data. Kesimpulan akhir diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti, bisa juga hasil berupa hipotesis atau teori.

7. Uji Keabsahan Data

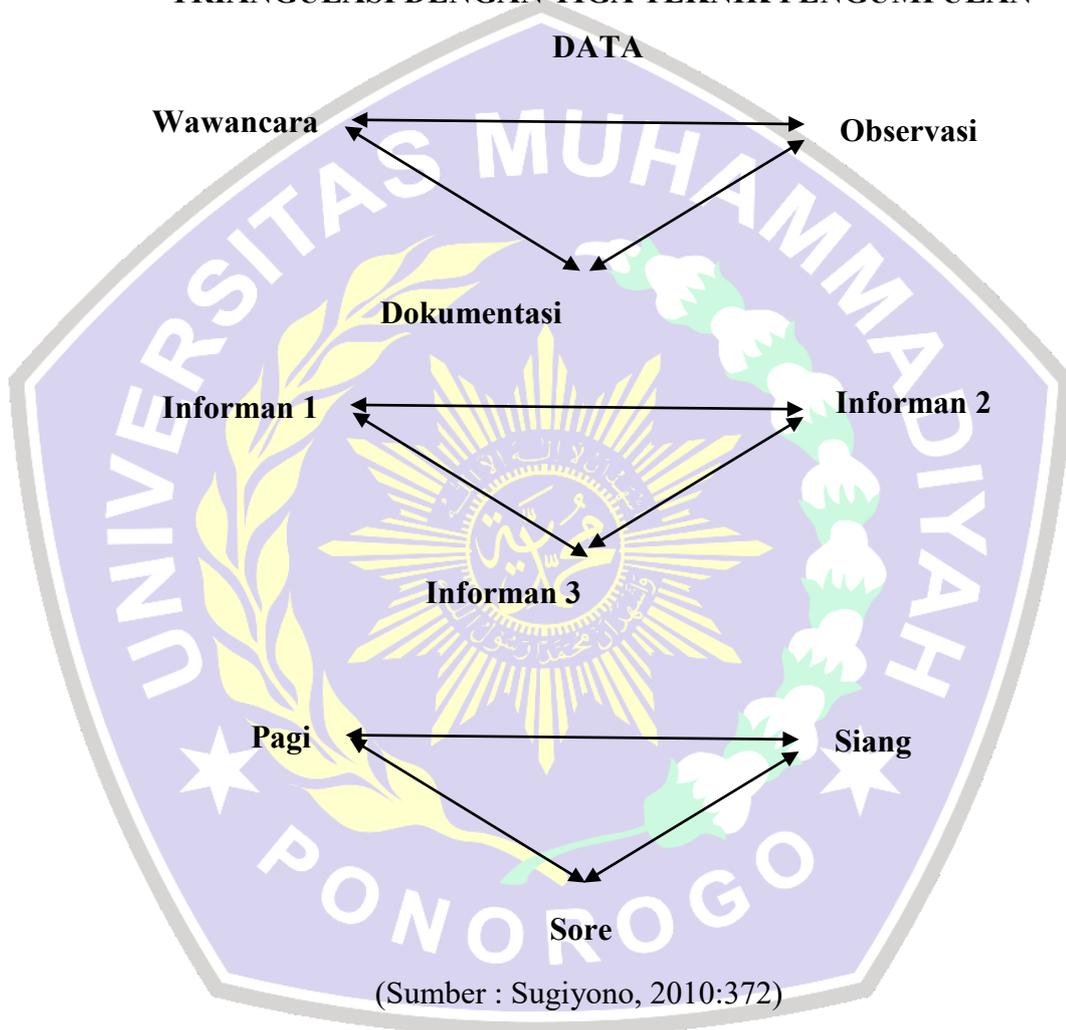
Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dengan menerapkan uji kredibilitas. Terdapat bermacam-macam cara untuk menguji kredibilitas hasil penelitian, dalam penelitian ini menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, serta triangulasi.

Untuk mengetahui apakah peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan, hal ini dapat dilihat dari surat perpanjangan pengamatan atau penelitian. Sebelumnya peneliti juga telah melakukan pengamatan di lokasi yang sama dalam Tugas Praktikum tentang “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Kupuk”, sehingga peneliti telah memiliki data-data hasil pengamatan. Dan untuk skripsi nanti peneliti akan melakukan pengamatan ulang dan menganalisis hasilnya.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sehingga urutan peristiwa dapat terekam secara sistematis. Selain itu untuk meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan memperbanyak membaca referensi-referensi hasil penelitian, dokumentasi, maupun buku-buku dan jurnal-jurnal.

Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2010:372) digunakan untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sebagaimana terlihat dalam gambar adalah skema teknik triangulasi.

GAMBAR 1.5
TRIANGULASI DENGAN TIGA TEKNIK PENGUMPULAN DATA



(Sumber : Sugiyono, 2010:372)